

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, maka penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia harus dapat membuat pembangunan daerah di manapun di tanah air. Pembangunan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan tidak diragukan lagi bahwa kita membutuhkan organisasi negara yang modern. Pelaksanaannya diarahkan pada tingkat daerah dan dapat mengatur serta mengarahkan sendiri kegiatan pembangunan agar pembangunan nasional sesuai dengan tujuannya.¹

Pelaksanaan pembangunan untuk tujuan kemakmuran rakyat, pelaksanaannya dilakukan secara seksama bahkan di daerah-daerah terpencil sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Dengan kata lain, negara memberi kesempatan dan fleksibilitas untuk melaksanakan otonomi. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Upaya pembangunan dilakukan dengan cara yang humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia yang menjadi objek pembangunan, selalu menciptakan keserasian dan keseimbangan, lahir dan batin. Wilayah negara

¹Agung Kurniawan, 2009, *Transformasi Birokrasi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 102.

²Faisal Basri, 2002, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 47.

Republik Indonesia terdiri dari wilayah provinsi, dan daerah yang lebih kecil yaitu kota dan/atau kabupaten serta Desa/Kelurahan. Daerah-daerah itu menjadi satu kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan harus merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, hidup di bawah standar atau belum sejahtera. Banyak keluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya. Keluarga yang belum sejahtera ini terutama menginginkan pemerintah memberikan dukungan berupa pekerjaan yang sangat mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah masyarakat Desa/Kelurahan yang memiliki ruang lingkup pemerintahan paling kecil. Peran pemerintah sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah orang yang benar-benar peduli terhadap nasib warganya, bukan sebagai batu loncatan untuk mencapai posisi tinggi atau pemerintahan, karena ia bersentuhan langsung dengan masyarakatnya sendiri.³

Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah membebaskan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan belenggu yang menghambat kemajuan bangsa kita. Permasalahan di atas merupakan permasalahan sosial yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bersama-sama kita akan mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi rakyat kita, karena tidak mungkin pemerintah mana pun dapat mengatasi

³ Miftah Thoha, 2012, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 74

tantangan dan masalah bangsa saat ini tanpa dukungan dan partisipasi semua komponen masyarakat dan bangsa.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan harus dilakukan secara melembaga dan terorganisir, melebihi peran pemerintah, dan menjadi wadah pertama dan utama bagi masyarakat untuk memecahkan masalah sosial. Kemakmuran dan kebahagiaan adalah cita-cita manusia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, manusia menggunakan berbagai cara dan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai komponen yang fundamental bagi kesejahteraan. Selanjutnya, karena banyak faktor pendukung untuk mencapai cita-cita tersebut, walaupun seharusnya kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, tingkat kebahagiaan itu relatif, tidak bisa mengukurnya karena itu relatif.

Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Bantul merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberdayakan untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat. Kapanewon Kasihan yang meliputi Kalurahan Ngestiharjo, Kalurahan Bangunjiwo, Kalurahan Tirtonirmolo, dan Kalurahan Tamantirto. Kalurahan Tirtonirmolo merupakan salah satu pemerintahan di antara empat kalurahan di bawah Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pengamatan penulis diperoleh hasil penelitian yang sangat menarik mengenai upaya pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengamatan menunjukkan bahwa ada masyarakat Kalurahan Tirtonirmolo yang tidak dapat menikmati hakikat kebahagiaan. Masalah dalam masyarakat termasuk kurangnya layanan dan

fasilitas sosial, kurangnya makanan, pakaian dan tempat tinggal, kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalurahan Tirtonirmolo belum merata.

Sebagian masyarakat di wilayah Kalurahan Tirtonirmolo yang tingkat kehidupannya sudah sejahtera, tetapi apakah kesejahteraan yang didapat merupakan hasil kerja pelaksanaan program yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo. Penanggulangan terhadap masalah kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kalurahan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama baik Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo maupun masyarakatnya. Peran Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo antara lain sebagai perpanjangan tangan program-program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Daerah seperti program Dinas Sosial, Dinas Pertanian maupun PNPM Mandiri Pedesaan.

Sebagian besar penduduk Kalurahan Tirtonirmolo menjalani kehidupan yang baik, yang merupakan hasil dari pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo. Penanganan masalah kesejahteraan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo, melainkan tanggung jawab bersama Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo dan warganya. Peran Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo antara lain sebagai perpanjangan tangan dari program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah, seperti bakti sosial, bakti pertanian dan program PNPM Mandiri Perdesaan.

Pengembangan kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk mengatur daerah dan memberdayakan mereka untuk mengelola dan

mengkoordinasikan kebutuhan masyarakat lokal. Konsep pembangunan seharusnya lebih ditujukan pada struktur pemerintahan tingkat paling bawah yaitu pembangunan Desa/Kelurahan. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam membangun Desa/Kelurahan di era otonomi daerah sangat penting karena secara langsung dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun infrastruktur daerahnya sendiri. Sebagai daerah yang memerintah sendiri, desa memiliki hak-hak khusus, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pembagian sumber daya desa, pemilihan Kepala Desa (kades) dan proses pembangunan.⁴

Pengelolaan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa/Kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu tujuan utama dalam proses pengelolaan Desa/Kelurahan adalah kemampuan perangkat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga meningkatkan daya saing Desa/Kelurahan.⁵

Lingkungan Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa/Kelurahan dan seluruh Perangkat Desa/Kelurahan sebagai pengemban tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan diharapkan perangkat tersebut dapat berfungsi dengan baik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan Desa/Kelurahan dan pembangunan masyarakat. Menurut ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa adalah badan

⁴ Subhan Goma, "Peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolangitan Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 1 No 1 (2015), hlm. 1.

⁵ Nur Ambia Arma, Junaidi, dan Tomi Jaffisa, "Peningkatan Aparatur Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kota Rantang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 2 (2020), hlm. 1-2.

yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas asal-usul dan sistem pemerintahan yang dihormati dalam sistem pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Selain UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan ini memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam struktur organisasi negara. Masih ada kekurangan seperti peraturan terkait sumber daya dll. Pemerintah juga menyadari perlunya regulasi yang demokratis dan profesional untuk pembangunan Desa/Kelurahan.

Pemerintah Desa/Kelurahan juga membutuhkan dana untuk operasionalnya. Tentu saja dana tersebut tidak bisa berasal dari Desa/Kelurahan itu sendiri, melainkan harus mendapat dukungan dana langsung dari pemerintah. Dana tersebut didistribusikan secara merata dengan mempertimbangkan potensi dan keragaman daerah. Dalam pengelolaan dana Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa/Kelurahan memerlukan Pemerintah Daerah yang kuat agar berhasil mengelola dana desa yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Aparatur Desa/Kelurahan dapat mensejahterakan masyarakat dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan mewujudkan Desa/Kelurahan mandiri.⁷

Pendapatan Asli Desa akan meningkat, perekonomian Desa/Kelurahan

⁶ Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, dan Novie Revlie Pioh, "Kinerja Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik", *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No 1 (2017), hlm. 2.

⁷ Komang Adi Kurniawan Saputra, A.A Ketut Jayawarsa, dan Putu Budi Anggiriawan, "Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset dan Profesionalisme untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol 4 No 1 (2019), hlm. 607.

juga akan meningkat atau membaik. Tindakan yang digunakan dapat berupa cara mengelola Pendapatan Asli Desa, meningkatkan kemungkinan Desa/Kelurahan menjadi pendukung Pendapatan Asli Desa. Sumber pendapatan utama Desa/Kelurahan paling efektif bagi Pemerintah Desa/Kelurahan ketika didukung oleh strategi pengelolaan Pendapatan Asli Desa.

Desa tidak boleh bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pengelolaan Pendapatan Asli Desa harus dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa sebagai sumber tambahan pendapatan desa. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan desa oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang sebelumnya dibebani oleh perencanaan pusat menjadi lebih fleksibel dan bebas mengatur.

Salah satu strategi peningkatan pendapatan Pemerintah Desa/Kelurahan adalah penyelenggaraan pengangkutan sampah. Pembangunan, pertumbuhan populasi, perkembangan teknologi, gaya hidup dan konsumsi adalah beberapa kemungkinan penyebab masalah lingkungan. Mencermatinya, tampaknya masalah lingkungan dapat muncul sebagai akibat dari proses pembangunan yang parsial.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa pembangunan bukanlah satu-satunya. Aspek pertumbuhan ekonomi lainnya sebenarnya menggunakan pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi, termasuk pola konsumsi, sebagai indikator keberhasilan. Di kawasan inilah sering terjadi konflik dengan isu pembangunan dan lingkungan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang

dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa/Kalurahan untuk memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan penopang kegiatan ekonomi desa, berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang melindungi kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Di sisi lain, sebagai institusi komersial yang bertujuan untuk mendapatkan penawaran dengan menyediakan sumber daya lokal ke pasar.⁸

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa/Kalurahan dapat mendirikan badan usaha negara sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa. Desa dapat mendirikan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinannya. Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi BUMDes sebagai badan usaha masyarakat desa yang mandiri menjamin kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Perlu ada pergeseran alokasi dan kebijakan sumber daya alam agar penduduk desa dapat mencapai potensi mereka, menghindari kerugian dan mendapatkan lebih banyak.

⁸ Saman, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 306.

BUMDes diharapkan mampu menjadi model dan penggerak roda ekonomi pedesaan. Aset ekonomi desa harus sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa.⁹

Melihat posisi BUMDes, saat ini kita dihadapkan pada realita kesenjangan modal asing dalam negeri yang semakin melebar, sehingga pedesaan menjadi sasaran yang sangat sulit untuk pengembangan usaha. Modal BUMDes yang sangat kecil tidak ada bandingannya dengan badan usaha milik swasta. Intervensi modal pasar sangat mungkin dilakukan di pedesaan karena pedesaan memiliki sumber daya alam. Keberadaan perusahaan milik desa ini akan menjadi penangkal kekuatan perusahaan asing dan dalam negeri. Struktur milik desa ini diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa dan mempengaruhi Pendapatan Asli Desa.¹⁰

BUMDes didirikan untuk mendukung atau memperkuat perekonomian desa, yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa yang didirikan dengan dukungan modal dari Pemerintah Desa/Kalurahan. Jenis usaha yang dijalankan meliputi beberapa bidang seperti usaha simpan pinjam, usaha persewaan/pemeliharaan perlengkapan pesta, usaha bengkel las, usaha pasar pedesaan, usaha pertanian, dan usaha wisata pedesaan. Namun, berbagai kegiatan badan usaha milik desa mempengaruhi Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul **“UPAYA PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN TIRTONIRMOLO**

⁹ Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta, LP3ES, hlm. 216.

¹⁰ Suwondo, 2004, *Administrasi Publik*, Bandung, Pelita Jaya, hlm. 1069.

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dalam penelitian ini dapat menemukan permasalahan yang kemudian akan dijadikan acuan untuk dapat mengkaji lebih rinci, adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat upaya Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti sehingga tujuan tersebut diharapkan menjadi spirit dan arahan peneliti dalam melakukan dan menyusun sebuah penelitian adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai upaya Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat upaya Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya terhadap teori yang sedang dikaji peneliti, yaitu teori mengenai upaya Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pihak Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk masyarakat memiliki gambaran tentang topik penelitian ini yaitu tentang upaya Kalurahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan penalaran peneliti.